

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2019

GINA RUFAYDA

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

E-mail: gina.rufayda@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how big the influence of government size, prosperity, intergovernmental revenue and regional expenditure on financial performance simultaneously and partially. The research variables are government size (X1), prosperity (X2), intergovernmental revenue (X3) and capital expenditure (X4) on financial performance (Y). The method of data collection is through analyzing government financial statements. The analytical method used is the classical assumption test and the Regression Estimation of the Panel Data Model, then based on the partial test (t test) obtained: (a) the size of government has no significant effect on financial performance. (b) prosperity has a significant effect on financial performance. (c) Intergovernmental revenue has a significant effect on financial performance. (d) Capital expenditure is significant to financial performance. Then based on the joint hypothesis test (Test F) it can be seen that the size of government, prosperity, intergovernmental revenue and capital expenditure have a significant effect on financial performance.

Keywords: Company size, prosperity, intergovernmental revenue, regional expenditure, financial performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran pemerintahan, kemakmuran, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan secara bersama-sama dan parsial. Variabel penelitian yaitu ukuran pemerintahan (X1), kemakmuran (X2), *intergovernmental revenue* (X3) dan belanja daerah (X4) terhadap kinerja keuangan (Y). Metode pengumpulan data melalui menganalisis laporan keuangan pemerintahan. Metode analisis yang digunakan adalah Uji asumsi klasik dan Estimasi Regresi Model Data Panel, maka berdasarkan uji parsial (Uji t) diperoleh: (a) ukuran pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. (b) kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. (c) *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. (d) Belanja daerah signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian berdasarkan uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui bahwa ukuran pemerintahan, kemakmuran, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: Ukuran perusahaan, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja daerah, kinerja keuangan

PENDAHULUAN

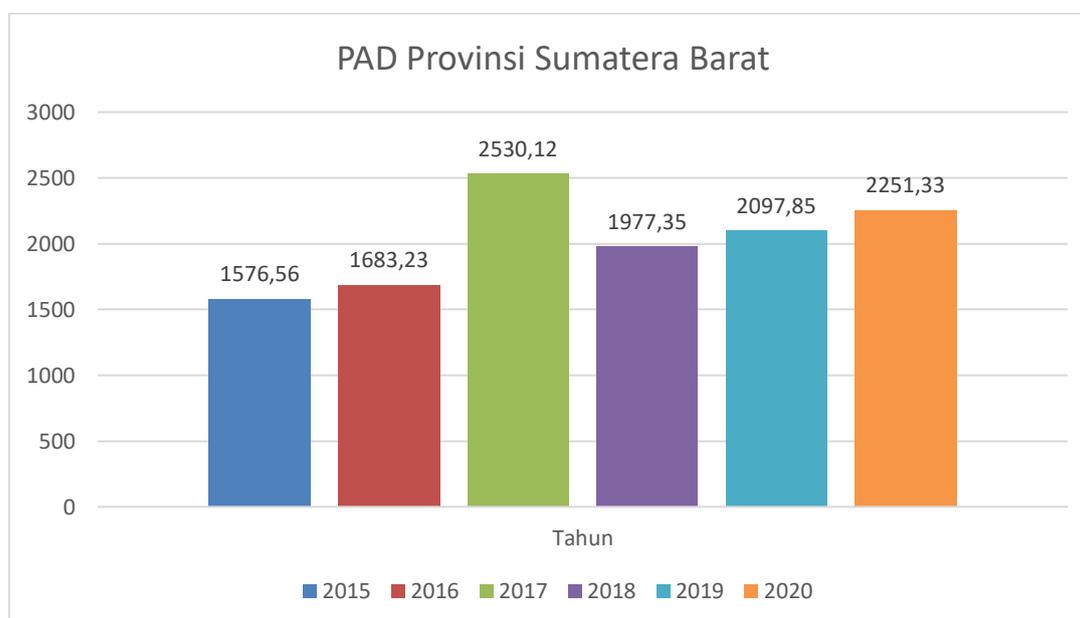
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah ditetapkan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah yang menyediakan

pelayanan yang baik bagi masyarakat luas di daerah tersebut serta mengelola keuangannya transparan dan akuntabel tentunya dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lebih baik lagi (Basir, 2012).

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah persoalan keuangan daerah karena berpengaruh terhadap perkembangan daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat (Wahyuni, 2020) dan terkait dengan mobilisasi dari sumber-sumber keuangan di daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjaga ketersediaan aset daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 pasal 4 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi serta dijabarkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Namun, pendapatan daerah di tiap Kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan, yang dapat dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020
(Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat terjadi penurunan dari tahun 2017 dan melaju lambat dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini disebabkan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perubahan APBD Kabupaten dan

Kota yang didahului dengan penyerahan rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2020. Penurunan kemampuan keuangan daerah tentu saja berdampak terhadap berkurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk belanja. Sehingga penyesuaian terhadap perubahan target kinerja kegiatan dan program pembangunan menjadi tidak terlalu besar.

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintahan daerah. Salah satunya pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari et al, 2016). Informasi yang terkandung di dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah (Febrianto, 2018).

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Kinerja keuangan daerah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor karakteristik pemerintahan seperti ukuran pemerintah daerah, kemakmuran (*Wealth*), *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Sari et al, 2016). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktivitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil.

(Maiyora et al, 2015) berpendapat bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan

keuangannya. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu kemakmuran (*wealth*). Kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran daerah (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lestari, 2019). Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD, karena dengan pertumbuhan yang positif dimanfaatkan pemerintah guna mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah (Maiyora et al, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah merupakan 2 (dua) unsur penting dari konsep PAD (Natoen, 2019).

Selain dari kemakmuran ada juga faktor *intergovernmental revenue* sebagai faktor dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. *Intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat (Nugroho, 2018). Menurut (Novyandra, 2016) *intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan.

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja daerah dapat dibedakan menjadi belanja daerah dan belanja berulang pada layanan komunitas sosial, pengeluaran untuk administrasi dan pengeluaran pada pelayanan ekonomi (Putu et al, 2018).

Belanja daerah terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik. Belanja daerah dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan saran yang dibangun pemerintah. Semakin banyak pembangunan yang dibuat pemerintah daerah maka semakin baik pula dalam pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik sehingga memperlancar segala aktifitas yang ada di pemerintah daerah tersebut maka kinerjanya juga akan semakin baik (Annisa et al, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Annisa et al, 2020). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik - baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Menurut (Kusuma & Handayani, 2017) prinsip utama teori ini menyatakan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima wewenang (disebut agen). Dalam suatu hubungan kerja, yakni antara investor (sebagai prinsipal) dengan manajer (sebagai agen). Pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik antara prinsipal dengan agen. Agen mempunyai tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun agen juga berkepentingan untuk

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal ini yang menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik juga dapat terjadi karena pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mendefinisikan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Karakteristik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian, LPPD pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tergantung dengan tanggungjawab dan karakteristik masing-masing pemerintah daerah (Mustikarini et al, 2012). Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Maka dapat disimpulkan karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Kusuma & Handayani, 2017).

Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut faktor karakteristik pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut (Nugroho, 2018) ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Menurut (Susilawati, 2016) menyatakan bahwa suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga

pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah 14 daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Ukuran (size) pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah (Novitanri & Kiswanto, 2016). Semakin besar ukuran pemerintah daerah lebih dituntut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Ukuran (size) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan total aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Maiyora et al, 2015).

4. Kemakmuran (*Wealth*)

Kemakmuran (*wealth*) adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Kusuma & Handayani, 2017). Semakin tinggi kemakmuran semakin tinggi kinerja atau sebaliknya.

(Annisa et al, 2020) menyatakan bahwa kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut (Natoen, 2019) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah merupakan 2 (dua) unsur penting dari konsep PAD.

Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

5. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Marhawai, 2015). *Intergovernmental revenue* adalah pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah (Andani et al, 2019). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Novyandra, 2016). Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

6. **Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian berupa penelitian deskriptif yang salah satu jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah penekanan pada analisis data-data angka dari hasil perhitungan yang kemudian akan diolah menggunakan metode statistika. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana penelitian ini terdiri dari 2 jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten dan Kota. Sehingga, sampel pada penelitian ini yaitu 76 laporan keuangan tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program eviews 9.

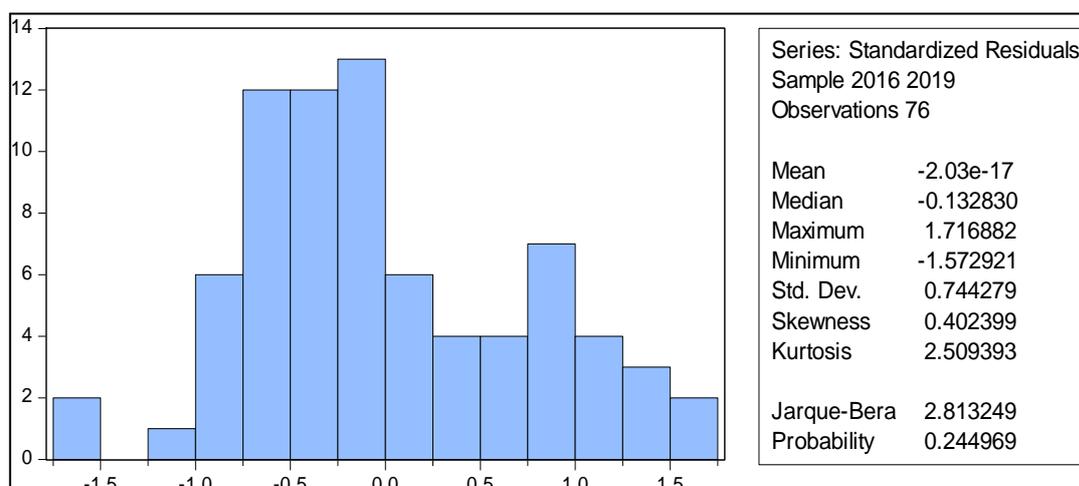
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas



Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai probability > 0,05, sehingga variabel penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam penelitian adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel independent menunjukkan $< 0,8$. Hasil Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-	-
X2	0,621	1	-
X3	-0,416	-0,79	1
X4	0,721	0,775	-0,194

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel independent dibawah $< 0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual. Sedangkan homokedastisitas yaitu adanya gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat di uji dengan cara menggunakan Uji Gletser. Kriteria untuk pengujian Gletser adalah jika nilai prob masing variabel $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0,001	0,001	2,001	0,051
X2	0,001	0,001	-0,856	0,394
X3	-0,001	0,002	-0,518	0,606
X4	0,001	0,001	-2,056	0,434

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian heterosk-edastisitas pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai prob tiap variabel $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan estimasi regresi data panel ini bertujuan untuk melihat model mana yang terbaik dari common effect model, fixed effect model dan random effect model. Dalam penelitian ini menggunakan dua uji, yaitu uji chow dan uji hausman.

Hasil Uji Chow

Uji ini digunakan untuk melihat model yang terbaik antara model common atau fixed effect. Berikut adalah hasil regresi dari uji chow:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,786	18,53	0,706
Cross-section Chi-square	17,988	18,00	0,456

Sumber: Data diolah

Uji chow diatas menunjukkan nilai F statistik sebesar 0,79 dengan nilai p-value $0,71 > \alpha 0,05$, dan nilai Chi-square sebesar 17,988 dengan nilai p-value $0,456 > \alpha 0,05$. Dengan nilai probabilitas di atas nilai alpha, jadi dalam uji chow ini yang terpilih adalah Model Common Effect.

Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada random effect di panel data dan digunakan untuk memilih antara fixed effect dan random effect, model mana yang paling tepat dipakai pada data penelitian ini. Berikut adalah hasil regresi dari uji hausman:

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,577	4,00	0,469

Sumber: Data diolah

Dari hasil regresi uji hausman diatas, dapat dilihat jika nilai cross-section yaitu sebesar 3,577 dengan nilai p-value sebesar $0,469 > \alpha 0,05$. Dengan nilai probabilitas diatas nilai alpha, jadi model yang diterima adalah Random Effect Model. Berikut tabel hasil uji bersamaan:

Tabel 7. Hasil Uji Bersamaan

Keterangan	Perbandingan Model	Terpilih
Uji Chow	CE vs FE	CE
Uji Hausman	FE vs RE	RE

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada uji Chow yang terpilih adalah Common Effect Model, pada uji Hausman yang terpilih adalah Random Effect Model. Dengan demikian, dalam pemilihan model pada penelitian ini yaitu digunakan model Random Effect Model.

Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi

Adapun pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model Random Effect yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14,930	0,429	34,833	0,000
X1	0,001	0,001	-1,263	0,211
X2	0,001	0,001	10,612	0,000
X3	-0,438	0,037	-11,700	0,000
X4	0,001	0,001	-9,690	0,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah memiliki nilai koefisien 0,001 dengan nilai sig 0,211 > 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan adalah positif namun tingkat signifikan lebih dari 0,05 dalam artian nilai yang diperoleh belum dapat dipercaya. Hal ini berarti ukuran pemerintah tidak mempengaruhi kinerja keuangan / APBD dari suatu daerah.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai koefisien 0,001 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel PAD terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan adalah positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah menjadi tanda baiknya kinerja keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai koefisien -0,438 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel IR terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana pengaruh *intergovernmental revenue*

terhadap kinerja keuangan adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa penerimaan eksternal daerah di Sumatera Barat tidak perlu ditingkatkan karena memiliki pengaruh negatif.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai koefisien 0,001 dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan adalah positif. Hal ini berarti bahwa pengaturan belanja daerah pada suatu daerah di Sumatera Barat sudah tepat.

Berdasarkan tabel 8 terlihat nilai F statistic 466,37 dan tingkat sig $0,00 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah, PAD, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,961 hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel ukuran pemerintah, PAD, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah sebesar 0,961 atau 96,1% terhadap kinerja keuangan, sedangkan sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Implikasi Penelitian

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis variabel ukuran perusahaan (SIZE) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,21, Tahapan pengolahan data digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,21 > 0,05$ maka keputusannya adalah H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini berarti bahwa diartikan bahwa ukuran suatu pemerintahan belum menjadi tolak ukur baiknya kinerja keuangan suatu daerah. Beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki total asset yang tinggi namun capaian kinerja keuangan belum optimal.

Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis variabel kemakmuran diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00, Tahapan pengolahan data digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya

adalah H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat.

Hasil ini konsisten dengan uraian teori dan hipotesis yang diajukan sebelumnya, dimana kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kemakmuran pada suatu daerah maka daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini sesuai dengan konsep yang ditemukan oleh (Sari et al, 2016), (Febrianto, 2018) yang menyatakan kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis variabel *Intergovernmental Revenue* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Tahapan pengolahan data digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat.

Hasil ini konsisten dengan uraian teori dan hipotesis yang diajukan sebelumnya, dimana *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik *Intergovernmental Revenue* pada suatu daerah maka daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini sesuai dengan konsep yang ditemukan oleh (Nugroho, 2018), (Novyandra, 2016) yang menyatakan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Belanja daerah terhadap kinerja keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis variabel belanja daerah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, Tahapan pengolahan data digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat.

Hasil ini konsisten dengan uraian teori dan hipotesis yang diajukan sebelumnya, dimana belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa belanja daerah di tiap kabupaten telah berdampak pada output yang tepat. Penelitian ini sesuai dengan konsep yang ditemukan oleh (Putu et al, 2018), (Angelina, 2019) yang menyatakan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kemakmuran, Intergovernment Revenue dan Belanja daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian nilai F sebesar 466,37 dan nilai sig sebesar 0,000 dengan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig yang merupakan P-Value yang dihasilkan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah ukuran pemerintah, PAD, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat.

Hasil ini konsisten dengan uraian teori dan hipotesis yang diajukan sebelumnya, dimana ukuran pemerintah, PAD, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti dengan meningkatkan ukuran pemerintah, PAD, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah maka kinerja keuangan akan meningkat.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dengan tingkat signifikan lebih besar dari alpha ($0,211 > 0,05$).
2. Variabel kemakmuran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dengan tingkat signifikan lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$).
3. Variabel *intergovernment revenue* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dengan tingkat signifikan lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$).
4. Variabel belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat, dibuktikan dengan tingkat signifikan lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$).
5. Variabel ukuran perusahaan, kemakmuran dan *intergovernment revenue* dan belanja daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat dibuktikan dengan tingkat signifikan lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$). Sumbangan variabel SIZE, DAU dan belanja daerah sebesar 0,986

atau 96,1% terhadap kinerja keuangan, sedangkan sisanya sebesar 3,9% di pengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, M., Sarwani, S., dan Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, vol. 9, no. 2, pp. 111-130, doi: 10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130.
- Angelina, N., Efni, Y., dan Rasuli, M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, vol. 44, no. 12, pp. 243-254.
- Annisa, A. N., Abdullah, M. I., Iqbal, M., dan Yamin, N. Y. (2020). Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah: Ukuran Pemerintahan Daerah, Dana Peirmbangan, dan Belanja Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerag Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akun Nabelo J. Akunt. Netral, Akuntabel, Objekt.*, vol. 2, no. 2, pp. 1689-1696.
- Basir, A. M. A. (2012). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Febrianto, N. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah , Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Dan Ntergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. p. 121.
- Kusuma, A. R., dan Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 404-420.
- Lestasri, L. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Sustain*, vol. 11, no. 1, pp. 1-14.
- Maiyora, G., Yusralaini, dan Natariasari, R. (2015). Pengaruh Kerakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabuoaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). vol. 2, no. 2, pp. 1-13.
- Marhawai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 S.D 2014). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 49-58.
- Natoen, A., Febrianti, A., Sarikadarwati, dan Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 106-117.

- Novitanri, N. A., dan Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Account Analysis Jurnal*, vol. 5, no. 1, pp. 1-10, doi: 10.15294/aaj.v5i1.9759.
- Novyandra, R. (2016). Pengaruh Belanja daerah, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size , Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidik*, vol. 7, no. 1, p. 27, doi: 10.25273/jap.v7i1.1823.
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., dan Sedana, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen*, vol. 7, no. 2, pp. 1080-1110.
- Sari, I., Agusti, R., dan Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 3, no. 1, pp. 679-692.
- Susilawati, P. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). pp. 1-20.
- Wahyuni, B. R. N., dan S. S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Tangible Jurnal*, vol. 5, no. 1, pp. 43-57, 2020, doi: 10.47221/tangible.v5i1.103.